

Politik Tahu Tempe

Oleh Purwoko



CERITA Krisis kedelai di negara agraris membuat banyak orang terpaksa seolah melihat sajian *sundan ayam* karena mengakibatkan lahan kelelahan dari sendiri. Indonesia sebagai negara kepabeanan yang sangat sibuk dengan menciptakan matatus yang dominan barunya tidak perlu tergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan kedelai tetapi kenyataannya kabutuhan kedelai Indonesia sebagian besar diperoleh dari impor.

Data Kementerian Pertanian (Kementerian menyebutkan sekitar 96,4% kebutuhan kedelai di dalam negeri berasal dari impor. Hingga 2021, impor kedelai untuk tahuan tempe saja mencapai 26 juta ton, sentimen impor kedelai secara keseluruhan kebutuhan nabati olahan dari kedelai mencapai 7,3 juta ton. Prediksi kedelai domestik sampai akhir Desember 2021 masih sama dengan tahun lalu hanya mencapai 411.975 ton. Harus ada keperihatan dan kepedulian pemerintah atas tragedi tahu tempe, makaroni sebagian besar masuk arakir. Indonesia Politik tahu tempe seperti apa yang harus dilakukan Indonesia agar krisis kedelai tidak terulang serupa?

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sensus) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2020, diketahui bahwa setiap orang di Indonesia rata-rata tahu tempe dan tahu rata-rata 37 potong setiap bulan yang belum lebih dari sepertiga dalam seluruh warga menggunakan tempe merupakan tahu. Dalam lima tahun

terakhir, angka konsumsi tempe dan tahu pun relatif tak berubah. Tempe dianutnya atau disajikan tahu, perbandingannya konsumsi tempe mencapai 24 potong dalam sebulan sedangkan konsumsi tahu sebanyak 13 potong sebulan.

Harga tempe dan tahu juga relatif stabil pada 2016 untuk bisa memakan 37 potong tempe atau tahu membutuhkan dana Rp 9.995 per bulan, sedangkan pada 2020 berhasil solusi menjadi Rp 10.557 per bulan atau naik Rp 562.

Jika menyikapi apa yang disampaikan posdini dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bahwa produksi kedelai nasional cenderung turun. Dari 907 ribu ton pada 2010 menurun menjadi 424,2 ribu ton pada 2019, karena ada penurunan

hasil bahan panen dari 660,8 ribu hektare (ha) pada 2010 menjadi 265,3 ribu ha (2019). Hal ini juga dipengaruhi perubahan fungsi lahan kg sektor nonpertanian (Indef, 7 Juni 2021). Stimpak sekali tutuk ada keberpihakan pemerintah terhadap para produsen tahu dan tempe. Harapannya pemerintah jangan sembarangan memberikan izin untuk konversi lahan pertanian produktif ke sektor nonpertanian karena dampaknya terhadap jumlah produksi pertanian.

Upaya Khuras

Pengolahan tahu tempe harus dimulai dengan mengolah sistem pertanian Indonesia. Program pertanian untuk meningkatkan padi, jagung, dan kedelai (juga) yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo (klik) mengena apaya khuras sejak tahun 2015 pun belum bisa berkratik. Petani juga masih semakin-seni memanfaatkan komoditas pertanian dengan berbagai alasan logistiknya (Infopublik, 2015).

Sebenarnya Indonesia pernah swasembada kedelai pada 1992 dengan produksi nasional yang mencapai 1,8 juta ton, dengan luas lahan 1,4 juta ha, seharusnya lahan tanam kedelai tinggal sekitar 600 ribu ha, sehingga produksi kedelai lokal meningkat.

Layaknya halnya pertanian kedelai ini harus segera ditanggung oleh pemerintah. Menteri Pertanian jangan hanya menyatakan potensi tanah tidak mampu memenuhi kedelai. Menteri Perdagangan jangan hanya bangga dengan hasil-hasil impor di luar kejauhan berapa.

Masyarakat tentu akan mendukung jika pemerintah menjalankan politik tahu tempe secara serius, misalkan jangan hanya mengeluarkan pernyataan *stand up comedy* yang dimulainya oleh para pejabat di negara ini yang seolah membelakangi masyarakat, padahal dia sedang memerlukan peran sebagai komisi yang seolah tidak sudi dan antara yang dicaplok dan dinginkan.

Tujuh politik tahu tempe mengemban tugas dan keberpihakan tetap kapur lagi kondisinya jika tidak segera. Area buatan jagung hanya dieksplorasi hanya untuk pertumbuhan, jangan hanya menanam pohon manis saja, jangan hanya mencuci bangunan-bangunan industri yang bersifatkan di masa-masa lalu, tetapi siapkan untuk membuka lahan baru pertanian padi, jagung, dan kedelai.

Pembukaan lahan pertanian baru harus dibantu traga kerja, bantuan, dan popoknya. Terikat dengan populasi pertanian harus memambat jumlah populasi subduktif terutama populasi orangtua, agar lahan pertanian yang baru tidak langsung dibuang oleh populasi kaum yang memerlukan lahan.

Produktivitas lahan jangan dilanjutkan dengan gaji pempek dan sang ayam dengan mengelus-pungkuk populasi kota dengan doas tinggi. Indonesia masih mengelupas pertanian klasik, dasar pertanian seperti suluhnya mendapatkan bantuan singkat, semakin berkembangnya infrastruktur jaringan yang memadai, kurang fokusnya penelitian dan teknologi pertanian yang cukup, dan langkahnya sumber daya manusia (SDM) terdiri yang man menekuni dunia pertanian.

Hilangnya generasi cendekia yang mampu mengakaplasar pengaruh untuk keberlanjutan dunia pertanian harus menjadi prioritas jika Indonesia mengharapkan swasembada pangan. Berani tidak sekedar membatalkan kecemasan narasi, melainkan juga membangun inovasi yang dikembangkan dengan berbaik pengaruhnya (46).

— Dr. Purwoko MM, sivitas
MM FEB Universitas Ahmad
Dzkiyah (UAD) Yogyakarta

Kontak artikel:
wicaknawidjaja@gmail.com
Pengaruh makroekonomi 7.000 karakter dengan spasi, berlatar
pasca pemerintahan. (Red)

